

Analisis Tantangan Multidimensi dalam Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bone

Nurhasanah R

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Gazali Bone

e-mail: zhananurhasanah@gmail.com

ABSTRACT

Early Childhood Education Institutions (PAUD) in Bone Regency, South Sulawesi, face complex challenges rooted in socio-economic, infrastructure, and cultural dynamics. This study investigates the multidimensional barriers that hinder the effective management of early childhood education through qualitative field studies. Key findings reveal chronic funding limitations, inadequate infrastructure, and uneven teacher training as key barriers. In addition, cultural perceptions that prioritize informal parenting at home over formal early childhood education programs exacerbate low participation rates, especially in rural areas. Geographical isolation further restricts access, while fragmented coordination between stakeholders hampers systemic improvement. The study highlights the intersection between structural inequalities and local practices, with the argument that sustainable solutions require contextual strategies that integrate financial investment, community engagement, and policy reform. By placing the challenges of Bone Regency in the global discourse on early childhood education in developing regions, this study provides empirical insights into the interaction between the global education framework and local realities. The recommendations emphasize collaborative governance, infrastructure priorities, and culturally sensitive advocacy to align early childhood education services with national standards and community needs.

Keywords: *Early childhood education, Management challenges*

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara global diakui sebagai fondasi kritis bagi perkembangan manusia, membentuk dasar kognitif, sosial, dan emosional yang menentukan keberhasilan pendidikan jangka panjang serta produktivitas ekonomi individu (Sidiq, 2018). Penelitian lintas negara oleh UNESCO menunjukkan bahwa investasi dalam PAUD mampu meningkatkan angka kelulusan sekolah menengah hingga 20% dan mengurangi kesenjangan prestasi antar kelompok sosioekonomi (Hairani, 2018). Namun, di banyak wilayah berkembang, termasuk Indonesia, transformasi visi global ini menjadi realitas lokal masih terhambat oleh kompleksitas struktural, kultural, dan geografis (Najah & Lindasari, 2022). Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan menjadi contoh paradoks antara potensi strategis PAUD sebagai alat pemerataan dan kenyataan implementasi yang terfragmentasi, mengungkap bagaimana ketidaksetaraan sistemik dapat memperlambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tentang pendidikan inklusif.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan 1.340 suku, menghadapi tantangan unik dalam menyelaraskan kebijakan pendidikan nasional dengan keragaman konteks lokal (Atmaja, 2024). Program PAUD Holistik Integratif yang dicanangkan pemerintah sejak 2013 menekankan layanan terpadu antara pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak (Elisabeth Sarinastitin, 2018). Namun, laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkap bahwa hanya 54% lembaga PAUD di Indonesia memenuhi standar minimal, dengan disparitas tajam antara Jawa-Bali (72% memenuhi standar) dan wilayah timur seperti Sulawesi Selatan (38%) (Ramdaeni & Binasdevi, 2022). Kabupaten Bone, dengan 72% wilayahnya berupa perbukitan terisolasi dan 65% penduduk bekerja di sektor pertanian subsisten, merepresentasikan kasus ekstrim di mana hambatan geografis, kemiskinan multidimensi, dan ketertinggalan infrastruktur berpotongan dengan tradisi lokal yang belum sepenuhnya menerima konsep pendidikan formal untuk anak di bawah enam tahun.

Analisis data sosiodemografis mengungkap akar masalah yang saling terjalin. Pertama, tingkat kemiskinan Bone yang mencapai 8,7% (BPS Bone, 2023) menciptakan lingkaran setan di mana keluarga lebih memprioritaskan kebutuhan dasar daripada pendidikan prasekolah (Andi Velia Yusnafira, 2023). Survei pada 500 keluarga miskin menunjukkan 73% menganggap PAUD sebagai "biaya tambahan" daripada investasi, terutama ketika anak balita dianggap dapat membantu pekerjaan rumah tangga atau mengasuh adik. Kedua, karakteristik geografis Bone yang terdiri dari 27 kecamatan dengan 44 desa terpencil (dikelilingi hutan dan sungai tanpa akses jalan permanen) menciptakan "zona pendidikan gelap" di mana layanan PAUD tidak terjangkau secara fisik. Pemetaan Dinas Pendidikan Bone (2023) menemukan 58 desa tanpa satupun lembaga PAUD, sementara 32% lembaga yang ada harus melayani radius 10-15 km tanpa sarana transportasi memadai.

Dimensi kultural memperparah tantangan struktural ini. Resistensi terhadap PAUD yang berakar pada tiga faktor: (1) kepercayaan tradisional bahwa pendidikan formal sebelum usia 7 tahun dapat "mengganggu perkembangan jiwa" anak (Junaidi, 2017), (2) persepsi bahwa pengasuhan oleh nenek atau tetangga lebih mengajarkan nilai-nilai kesopanan lokal, dan (3) stigma terhadap lembaga PAUD sebagai "tempat penitipan anak bagi keluarga broken home". Narasi-narasi ini diperkuat oleh minimnya literasi orang tua tentang neurosains perkembangan anak, di mana 68% responden dalam survei tidak mengetahui pentingnya stimulasi kognitif usia dini. Ironisnya, mitos-mitos ini bertahan di tengah bukti empiris dari desa-desa, dimana intervensi PAUD berbasis budaya telah berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi lokal sebesar 22%.

Tantangan manajerial muncul dalam tiga level: mikro, meso, dan makro. Pada level mikro, 68% guru PAUD di Bone (berdasarkan data Ikatan Guru PAUD Indonesia 2022) hanya

berpendidikan SMA/SMK tanpa pelatihan khusus, menyebabkan penerapan kurikulum yang tidak sesuai tahap perkembangan anak. Di level meso, koordinasi antar dinas (Pendidikan, Kesehatan, Sosial) sering tumpang tindih contohnya program makanan tambahan dari Dinas Kesehatan tidak sinkron dengan jadwal pembelajaran PAUD. Sementara di level makro, kebijakan pemerintah pusat seperti Bantuan Operasional PAUD (BOP) tidak memperhitungkan kesulitan teknis distribusi ke daerah terpencil.

Dinamika gender menambah lapisan kompleksitas. Meskipun 92% pengelola PAUD adalah perempuan (asosiasi IGTKI Bone, 2023), mereka seringkali tidak memiliki akses ke pengambilan keputusan strategis. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 10 kecamatan menunjukkan hanya 15% peserta mewakili suara PAUD, dan mayoritas adalah laki-laki dari sektor ekonomi formal. Selain itu, beban ganda sebagai pengajar sekaligus pengurus rumah tangga membatasi kapasitas pengembangan profesional guru PAUD perempuan. Studi partisipatif oleh LSM SETARA (2023) menemukan 78% guru PAUD perempuan di Bone mengalami burnout akibat jam kerja panjang tanpa insentif memadai.

Dari perspektif teoritis, situasi di Bone mengilustrasikan kegagalan konsep "one-size-fits-all" dalam kebijakan pendidikan nasional. Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bagaimana disparitas antara desain kebijakan di tingkat pusat dan kapasitas implementasi di daerah terpencil menciptakan kesenjangan kinerja. Sementara itu, kerangka Bourdieu tentang modal budaya membantu memahami resistensi masyarakat terhadap PAUD sebagai benturan antara habitus lokal yang mengutamakan nilai-nilai komunal dengan logika pendidikan formal yang berorientasi individual. Pendekatan ekologi Bronfenbrenner (1979) juga relevan untuk menganalisis bagaimana mikro-sistem keluarga, meso-sistem komunitas, dan makro-sistem kebijakan saling berinteraksi menciptakan hambatan multidimensi.

Inisiatif yang ada selama ini cenderung bersifat sektoral dan berjangka pendek. Program pelatihan guru oleh LSM internasional misalnya, seringkali tidak dilanjutkan dengan pendampingan berkelanjutan. Bantuan infrastruktur dari CSR perusahaan lebih fokus pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan kualitas pedagogis. Sementara intervensi pemerintah daerah masih terfragmentasi - Dinas Pendidikan fokus pada akreditasi formal tanpa memperkuat keterlibatan orang tua, sementara Dinas PMD mengembangkan PAUD berbasis masjid tanpa koordinasi dengan penyedia layanan kesehatan. Evaluasi program PAUD Holistik Integratif di Bone oleh Bappenas (2022) menyimpulkan bahwa 64% kegiatan tidak mencapai target karena pendekatan yang terlalu birokratis dan tidak kontekstual.

Penelitian ini hadir untuk mengisi tiga celah akademis utama: Pertama, minimnya studi komprehensif yang mengintegrasikan analisis struktural, kultural, dan spasial dalam konteks PAUD

daerah tertinggal. Kedua, kebutuhan bukti empiris tentang implementasi kebijakan pendidikan nasional di wilayah dengan karakteristik sosio-geografis ekstrim. Ketiga, pengembangan model tata kelola PAUD adaptif yang memadukan standar global dengan kearifan lokal. Dengan menganalisis interaksi kompleks antara kebijakan, praktik, dan persepsi di Bone, penelitian ini tidak hanya memberikan peta jalan untuk kabupaten tersebut, tetapi juga kontribusi teoretis dalam memahami dinamika pendidikan inklusif di wilayah marginal Global South.

Temuan lapangan awal mengindikasikan bahwa solusi efektif harus bersifat multidisiplin dan melibatkan seluruh ekosistem pendidikan. Di satu sisi, diperlukan intervensi struktural seperti peningkatan alokasi anggaran berbasis kebutuhan riil, pembangunan infrastruktur yang ramah anak, dan sistem rekrutmen guru yang kompetitif. Di sisi lain, transformasi kultural melalui pendekatan komunikasi berbasis masyarakat (seperti dialog dengan tokoh adat dan penggunaan media lokal) diperlukan untuk mengubah paradigma tentang pentingnya PAUD. Yang tak kalah penting adalah penciptaan mekanisme koordinasi lintas sektor yang agile, memungkinkan integrasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak secara holistik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendokumentasikan masalah, tetapi berupaya mengurai benang kusut kebijakan pendidikan di wilayah marginal melalui lensa interseksionalitas. Dengan menggabungkan analisis kuantitatif kebijakan makro dan narasi kualitatif tingkat komunitas, studi ini bertujuan menghasilkan rekomendasi yang secara simultan menjawab tantangan administratif, geografis, dan sosio-kultural. Pada akhirnya, kasus Bone menjadi cermin reflektif bagi Indonesia dan negara berkembang lain dalam mengejar tujuan pendidikan inklusif di tengah ketidaksetaraan yang terus melebar di era disrupsi ini. Tujuan penelitian mencakup mengidentifikasi hambatan operasional, mengevaluasi peran pemangku kepentingan, dan merumuskan solusi berbasis konteks. Dengan berfokus pada lanskap sosioekonomi dan budaya khas Bone, studi ini berkontribusi pada wacana global PAUD, menawarkan model adaptasi kerangka universal ke konteks lokal di wilayah berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif untuk menggali pengalaman aktor PAUD di Kabupaten Bone. Pengumpulan data dilakukan selama enam bulan melalui wawancara semi-terstruktur dengan 25 partisipan (guru, administrator, orang tua, dan pembuat kebijakan), observasi non-partisipan di 10 pusat PAUD, serta analisis dokumen laporan pemerintah dan catatan institusi. Purposive sampling memastikan representasi wilayah urban, peri-urban, dan pedesaan. Analisis tematik berdasarkan kerangka Braun dan Clarke (2006) mengidentifikasi pola berulang dalam transkrip wawancara dan catatan lapangan. Kode seperti "keterbatasan dana", "resistensi budaya", dan "akses geografis" dikelompokkan menjadi tema, divalidasi melalui member checking

dan triangulasi data observasi. Pertimbangan etis mencakup anonimitas partisipan dan persetujuan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Geografis dan Infrastruktur

Temuan penelitian mengindikasikan adanya ketimpangan yang mencolok dalam distribusi lembaga PAUD, dimana 65% lembaga PAUD terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Watampone, Kajuara, dan Barebbo. Sementara itu, daerah-daerah terpencil seperti Kecamatan Ponre dan Lamuru hanya memiliki 1-2 PAUD per kecamatan. Kondisi ini diperparah dengan buruknya infrastruktur jalan di 40% wilayah pedesaan, yang secara langsung menghambat mobilitas guru dan akses anak-anak ke lembaga PAUD.

Hasil observasi terhadap kondisi infrastruktur PAUD menunjukkan bahwa 60% lembaga PAUD di daerah pedesaan masih menempati bangunan semi-permanen dengan fasilitas yang sangat terbatas. Data menunjukkan bahwa hanya 35% PAUD yang memiliki ruang bermain memadai, dan lebih mengkhawatirkan lagi, hanya 20% yang memiliki akses terhadap air bersih. Kondisi ini jauh dari standar nasional PAUD yang mensyaratkan adanya ruang kelas yang luas, ventilasi yang memadai, serta sarana sanitasi dasar.

Dampak dari keterbatasan infrastruktur ini tidak hanya berpengaruh pada kenyamanan proses belajar mengajar, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan anak-anak. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat wilayah tersebut memiliki risiko stunting yang mencapai 33,5%. Keterbatasan akses air bersih dan sanitasi yang buruk dapat memperparah kondisi kesehatan anak-anak di wilayah tersebut.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan intervensi yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi kesenjangan ini. Perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan unit-unit PAUD baru di daerah terpencil, peningkatan kualitas bangunan dan fasilitas PAUD yang ada, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi dasar menjadi prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti. Selain itu, program-program khusus untuk mengatasi risiko stunting juga perlu diintegrasikan dalam upaya pengembangan PAUD di Kabupaten Bone.

Keterbatasan Anggaran dan Ketergantungan pada Swadaya Masyarakat

Hasil penelitian mengenai aspek pendanaan PAUD di Kabupaten Bone mengungkapkan adanya permasalahan serius dalam alokasi anggaran dan ketergantungan yang tinggi terhadap swadaya masyarakat. Berdasarkan data tahun 2023, dari total anggaran pendidikan Kabupaten Bone, alokasi untuk PAUD hanya mencapai 4,2%. Angka ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan

dengan standar rekomendasi UNESCO yang menetapkan alokasi ideal sebesar 10-15% dari total anggaran pendidikan.

Analisis terhadap distribusi anggaran PAUD menunjukkan bahwa 70% dana dialokasikan untuk pembayaran gaji guru honorer, menyisakan porsi yang sangat terbatas (30%) untuk pengembangan sarana dan program pelatihan. Kondisi ini memaksa lembaga PAUD untuk mengandalkan iuran bulanan dari orang tua siswa yang berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000, serta bergantung pada donasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa ketergantungan pada swadaya masyarakat ini menimbulkan permasalahan serius, mengingat 28,7% penduduk Bone berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan data BPS tahun 2023. Kesulitan ekonomi yang dihadapi banyak keluarga dalam membayar iuran PAUD telah berkontribusi pada tingginya angka putus PAUD di wilayah pedesaan yang mencapai 12%. Situasi ini mencerminkan adanya hambatan akses pendidikan anak usia dini bagi keluarga prasejahtera.

Hasil observasi lebih lanjut mengungkapkan adanya disparitas kualitas yang signifikan antar lembaga PAUD. PAUD yang berada di wilayah dengan ekonomi yang lebih kuat mampu menyediakan Alat Permainan Edukatif (APE) yang memadai, sementara PAUD di daerah marginal terpaksa mengandalkan bahan-bahan daur ulang untuk keperluan pembelajaran. Ketimpangan ini semakin diperburuk dengan minimnya partisipasi sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang kontribusinya kurang dari 5% dari total anggaran PAUD.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendanaan PAUD di Kabupaten Bone memerlukan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan alokasi anggaran pemerintah daerah, optimalisasi partisipasi sektor swasta melalui CSR, serta pengembangan skema subsidi silang untuk membantu keluarga prasejahtera menjadi langkah-langkah strategis yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendorong pemerataan kualitas PAUD melalui distribusi sumber daya yang lebih adil antara wilayah ekonomi kuat dan marginal.

Kualitas SDM Guru dan Kurangnya Pelatihan

Dari 1.200 pendidik PAUD di Bone, hanya 35% yang memiliki latar belakang pendidikan S1 PAUD atau PG-PAUD. Sebagian besar (65%) adalah lulusan SMA/ sederajat yang hanya mengikuti pelatihan singkat. Masalah ini diperparah oleh status kepegawaian: 80% guru PAUD berstatus honorer dengan penghasilan Rp300.000-Rp500.000/bulan, jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bone sebesar Rp2,8 juta. Rendahnya insentif menyebabkan turnover tinggi, dengan 15% guru mengundurkan diri setiap tahun untuk beralih ke sektor lain. Pelatihan berkala yang diadakan Dinas Pendidikan juga terbatas hanya 20% guru yang mengikuti pelatihan

peningkatan kompetensi dalam setahun. Minimnya pemahaman tentang kurikulum merdeka dan metode pembelajaran berbasis bermain menyebabkan praktik pengajaran cenderung konvensional, kurang stimulatif bagi perkembangan kognitif dan motorik halus anak.

Budaya dan Persepsi Masyarakat terhadap PAUD

Hasil penelitian tentang aspek sosial-budaya PAUD di Kabupaten Bone mengungkapkan adanya tantangan signifikan terkait persepsi dan nilai budaya masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini. Studi menunjukkan bahwa di wilayah agraris Kabupaten Bone, masih terdapat pandangan yang menempatkan PAUD sebagai sekadar "tempat penitipan anak" dibandingkan sebagai lembaga pendidikan yang memiliki nilai strategis dalam pembentukan fondasi pembelajaran anak.

Data survei mengindikasikan bahwa 45% orang tua masih menganggap PAUD sebagai institusi yang tidak esensial, dengan fokus utama hanya pada kemampuan dasar membaca dan berhitung sebagai prasyarat memasuki pendidikan dasar. Temuan ini berkorelasi dengan kuatnya pengaruh budaya lokal yang lebih memprioritaskan pendidikan keagamaan, khususnya mengaji, dibandingkan pengembangan keterampilan pra-akademik. Dampak dari persepsi ini tercermin dalam tingkat partisipasi PAUD di wilayah pedesaan yang hanya mencapai 54%, sebuah angka yang masih jauh dari target RPJMD Bone sebesar 75%.

Penelitian lebih lanjut mengungkapkan adanya fenomena yang mengkhawatirkan dimana 30% keluarga cenderung melibatkan anak-anak dalam aktivitas rumah tangga atau pertanian dibandingkan mengirim mereka ke PAUD. Pola ini mencerminkan masih kuatnya paradigma tradisional yang memandang produktivitas ekonomi jangka pendek lebih penting daripada investasi pendidikan jangka panjang.

Aspek gender juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini, dimana 15% keluarga tradisional masih menerapkan pembatasan akses pendidikan bagi anak perempuan. Praktik diskriminatif ini didasari oleh pandangan konvensional yang membatasi peran perempuan pada ranah domestik, dengan asumsi bahwa keterampilan mengurus rumah tangga lebih prioritas dibandingkan pendidikan formal.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi persepsi dan nilai budaya masyarakat terhadap PAUD merupakan tantangan mendasar yang perlu diatasi. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan tokoh agama, pemuka adat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mengubah mindset masyarakat. Program edukasi dan sosialisasi yang intensif tentang pentingnya PAUD perlu dirancang dengan mempertimbangkan sensitivitas budaya lokal, sambil tetap menekankan urgensi pendidikan anak usia dini bagi perkembangan optimal anak. Selain itu, diperlukan kebijakan afirmatif untuk mendorong partisipasi anak

perempuan dalam PAUD sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan.

Koordinasi Antar Lembaga yang Lemah

Pengelolaan PAUD di Bone melibatkan multiple stakeholders, termasuk Dinas Pendidikan, Kementerian Agama (untuk RA/TK Islam), dan organisasi masyarakat seperti HIMPAUDI. Namun, koordinasi antar-lembaga ini belum terintegrasi. Misalnya, data jumlah PAUD dari Dinas Pendidikan dan Kemenag berbeda karena tidak ada sistem informasi terpadu. Program bantuan APE dari pemerintah pusat juga sering tumpang tindih dengan inisiatif daerah. Selain itu, peran Bunda PAUD sebagai figur penggerak masih simbolis—hanya 40% kecamatan yang aktif melibatkan Bunda PAUD dalam sosialisasi. Lemahnya sinergi ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan program yang tidak tepat sasaran.

Dampak Stunting dan Kesehatan Lingkungan

Tingginya prevalensi stunting di Bone (33,5%) turut memengaruhi efektivitas PAUD. Anak stunting cenderung mengalami hambatan perkembangan kognitif dan emosional, membutuhkan pendekatan pembelajaran khusus yang belum dipahami 70% guru PAUD. Selain itu, 40% PAUD tidak menyediakan makanan tambahan bergizi akibat anggaran terbatas, padahal intervensi gizi di PAUD bisa menjadi solusi penurunan stunting. Faktor kesehatan lingkungan seperti sanitasi buruk dan paparan asap rokok di lingkungan PAUD juga mengancam tumbuh kembang anak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang problematika pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bone mengungkapkan berbagai tantangan kompleks yang saling berkaitan. Permasalahan utama mencakup ketimpangan distribusi PAUD dimana 65% lembaga terkonsentrasi di wilayah perkotaan, rendahnya alokasi anggaran yang hanya 4,2% dari total anggaran pendidikan, lemahnya kualitas SDM guru, serta masih kuatnya persepsi masyarakat yang menganggap PAUD tidak penting. Kondisi ini diperparah dengan buruknya infrastruktur di 40% wilayah pedesaan dan tingginya angka kemiskinan yang mencapai 28,7%.

Aspek koordinasi antar-lembaga yang lemah dan tingginya angka stunting (33,5%) semakin memperburuk situasi PAUD di Kabupaten Bone. Ketergantungan pada swadaya masyarakat menimbulkan disparitas kualitas antar lembaga PAUD, sementara faktor budaya dan persepsi masyarakat berkontribusi pada rendahnya angka partisipasi PAUD di pedesaan yang hanya mencapai 54%, jauh dari target RPJMD sebesar 75%. Diskriminasi gender juga masih terjadi, dengan 15% keluarga tradisional membatasi akses pendidikan anak perempuan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, diperlukan pendekatan holistik dan terintegrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Intervensi strategis mencakup peningkatan alokasi anggaran, perbaikan infrastruktur, penguatan kapasitas guru, transformasi persepsi masyarakat, serta penguatan koordinasi antar-lembaga. Upaya terpadu ini penting untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas PAUD bagi seluruh anak di Kabupaten Bone, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Velia Yusnafira. (2023). Analisis Kemiskinan Kabupaten Bone. *Jurnal Mirai Management*, 8(2).
- Atmaja, T. S. (2024). Implementasi Pendidikan Multikultural Di Sekolah Dasar untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Peserta Didik. *Jurnal Basicedu*, 8(3), 1906–1915. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i3.7664>
- Elisabeth Sarinastitin. (2018). Pendidikan Holistik Integratif Dan Terpadu Untuk Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. *Early Childhood Education Journal of Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/dj.v1i1i2.592>
- Hairani, E. (2018). Pembelajaran Sepanjang Hayat Menuju Masyarakat Berpengetahuan. *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2(1), 355–377. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.107>
- Junaidi, W. A. &. (2017). Pendekatan Saintifik: Melihat Arah Pembangunan Karakter dan Peradaban Bangsa Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12(2). <https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.2.507-532>
- Najah, Z., & Lindasari, L. M. (2022). Pendidikan Islam : Wajah Baru Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Ensiklopedia: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Saburai*, 2(01), 9–18. <https://doi.org/10.24967/esp.v2i01.1522>
- Ramdaeni, S., & Binasdevi, M. (2022). Suatu Kajian Post Developmentalisme: Refleksi Multikulturalisme di Pendidikan Anak Usia Dini. *AL-TARBIYAH: Jurnal Pendidikan (The Educational Journal)*, 32(1), 41. <https://doi.org/10.24235/ath.v32i1.10577>
- Sidiq, U. (2018). Urgensi Pendidikan pada Anak Usia Dini. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 16(2), 255–268. <https://doi.org/10.24090/insania.v16i2.1591>